

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa hal, yaitu: Amanat Undang-Undang, Perkembangan Industri Keuangan, Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan, Perlindungan Keuangan.

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan setelah di bentunya UU OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang serta pembentukan lembaga pengawasan, sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (*supervisory board*)

---

<sup>1</sup> Andika Hendra Mustaqim, “*Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*”, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 121.

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.

Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem peng aturan dan pengawasan OJK. Sistem pengawasan jasa keuangan secara terintegrasi dimulai di Skandinavia pada pertengahan tahun 1980an. Inggris dan Jepang menerapkan sistem pengawasan terintegrasi pada tahun 1998 dengan mendirikan *United Kingdom Financial Services Authority* dan *Japan Financial Services Agency*.<sup>2</sup>

Meskipun latar belakang pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu berbeda di setiap negara, namun untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasi tersebut, OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara terintegrasi. Indonesia sudah pernah mengalami krisis keuangan dahsyat pada 1997-1998, yang disebabkan guncangan di sektor perbankan. Berdasarkan studi dan pengalaman krisis tersebut, pemerintah menilai sistem pengawasan yang tepat bagi Indonesia adalah terintegrasi, atau *unified supervisory model*.

Meskipun secara umum sudah melepas pengawasan bank ke OJK, tetapi BI masih punya peran. BI harus tetap memperoleh data-data terkait perkembangan perbankan nasional sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan moneter. BI juga tetap bekerja sama dengan OJK dalam hal pengawasan bank berdampak sistemik yang bisa mempengaruhi seluruh sistem keuangan.

---

<sup>2</sup> Heidi Mandanis Schooner, "Central Bank's Role in Bank Supervision in the United States and United Kingdom", *Brooklyn International Law Journal*, Year 2003.

Namun yang menjadi permasalahan Apakah pengalihan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sudah berjalan Optimal dan efisien sesuai dengan Amanat Undang-Undang dan Bentuk Pengawasan yang dilakukan Sudah Berjalan secara Terintegrasi atau tidak.

Berdasarkan Uraian Diatas, Penulis Tertarik Untuk melaksanakan penelitian dan Pengajuan Skripsi Berjudul:

**“PENGALIHAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BANK BRI SYARIAH KC PEMATANGSIANTAR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Judul di atas maka saya menitik beratkan pada masalah pokok yang diidentifikasi yakni :

1. Bagaimana Dampak dari Pengawasan Perbankan setelah Dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan pada BRI Syariah KC Pematangsiantar?
2. Bagaimana Bentuk Pengawasan yang dilakukan Oleh OJK pada BRI Syariah KC Pematangsiantar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Dampak dari Pengawasan Perbankan setelah Dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan pada BRI Syariah KC PematangSiantar

2. Untuk mengetahui Bentuk Pengawasan yang Dilakukan oleh OJK pada BRI Syariah KC Pematangsiantar

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1) Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi minor ini peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif. Yaitu pendekatan dengan menggambarkan pemikiran, perilaku, dan perasaan serta sikap individu yang diteliti dengan variabel lainnya. Dimana pendekatan ini hanya mendeskripsikan. Dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi secara sistematis atau akurat.

##### 2) Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari responden selaku objek penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh dari pihak Bank BRI Syariah KC PematangSiantar berupa hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yakni data yang diolah yang diperoleh dari perusahaan, antara lain struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dan data-data yang berhubungan dengan aktivitas (kinerja) perusahaan.

##### 3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan analisis pengolahan data, penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan

menarik kesimpulan tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi, yang diperoleh dari perusahaan dan literatur-literatur yang telah ada.
2. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara atau angket) namun juga dapat digunakan untuk merekap berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

#### 4) Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan (data mentah) dan data jadi. Sehubungan dengan hal itu, ada juga batasan data sebagai bahan penelitian, yaitu bahan jadi yang ada karena pemilihan aneka macam tuturan.

Data lapangan atau data mentah merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data lisan (berupa tuturan) serta data tertulis. Data lisan dan tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau objek penelitian. Data lisan didokumentasikan ke dalam bentuk tulisan atau catatan penelitian. Data yang kedua adalah data jadi.

Data jadi merupakan suatu data mentah (data lapangan) yang telah mengalami proses penyeleksian data. Penyeleksian data mengacu pada permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu objek penelitian.

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara persiapan dan penyeleksian. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan seluruh data lapangan. Setelah semua terkumpul, peneliti memulai menyeleksi data sesuai dengan objek penelitian.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya peneliti lebih terarah dan mudah untuk dipahami, kemudian peneliti membuat skripsi minor ini dalam lima bab. Dan setiap bab dibagi sub – subnya sebagai berikut :

### **1. Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini, peneliti menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **2. Bab II : Landasan Teori**

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pengertian Pengawasan, Perbankan, Pengawasan Perbankan, Fungsi dan Tugas dari Otoritas jasa keuangan dan Fungsi dan Tugas dari Bank Indonesia, Hubungan antara Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan, seta Konsep dasar pengawasan dalam islam.

### 3. Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini peneliti menguraikan, Sejarah perusahaan , Visi dan Misi Perusahaan, struktur organisasi dan manajemen, serta jenis produk-produk pada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank BRI Syariah KC PematangSiantar

### 4. Bab IV : Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas keuangan pada Bank BRI Syariah KC PematangSiantar

### 5. Bab V : Penutup

Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### 6. Daftar Pustaka

### 7. Daftar Riwayat Hidup